

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK

Nurkhamidah Vina Uswatun Khasanah

Vinauswatunkhasanah96@gmail.com

Universitas PGRI Semarang

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution paid by the people to the state which is used for the needs of the state and the general public. People who pay taxes do not get direct benefits because taxes are used for public interest, not for personal gain. This research is a quantitative research that uses a deductive approach. This method uses multiple linear regression research and the data used are taken from primary and secondary data with a population obtained from motor vehicle taxpayers of 79601 with a sample of 100. Based on the results of the study indicate that: 1) Taxpayer awareness has an effect on motor vehicle taxpayer compliance. Hypothesis testing can be seen from the statistical value of $0.032 < 0.05$, then this proves that H_1 is accepted. 2) Tax sanctions affect the compliance of motorized vehicle taxpayers. Hypothesis testing can be seen that the statistical value is $0.028 < 0.05$, then this proves that H_1 is accepted. 3) There is a significant and significant effect between taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Pajak ialah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh rakyat. Pajak dipergunakan untuk keperluan negara dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak mendapatkan manfaat secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deduktif. Metode ini menggunakan penelitian regresi linier berganda dan data yang digunakan diambil dari data primer dan sekunder dengan populasi yang diperoleh dari wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 79601 dengan sampel 100. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PKB. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai statistik sebesar $0.032 < 0,05$, maka hal ini membuktikan H_1 diterima. 2) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai statistik sebesar $0.028 < 0,05$, maka temuan tersebut membuktikan H_1 diterima. 3) Ada pengaruh dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

PENDAHULUAN

Tanggung jawab Pemda di Indonesia kepada pemerintah pusat yaitu menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan untuk pemerataan pelaksanaan pembangunan dan desentralisasi pemerintah. Maka perlu adanya peran dari pemerintah daerah demi efisiensi dan epektifitas untuk penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah tersebut.

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kendala yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Berikut adalah tabel data tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

Tingkat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah (2015-2019)

| Tahun | Jumlah Kendaraan | Jumlah Tunggakan PKB |
|-------|------------------|----------------------|
| 2015 | 80165 | 9,433,241,285 |
| 2016 | 91494 | 11,694,071,165 |
| 2017 | 133,560 | 23,958,004,040 |
| 2018 | 146,533 | 28,080,660,893 |
| 2019 | 79601 | 23,179,859,150 |

Sumber: UPPD Kabupaten Demak (2020)

Dilihat dari tahun 2015-2019 jumlah kendaraan semakin meningkat, akan tetapi dari tahun ke tahun tersebut tunggakan PKB juga semakin meningkat, karena setiap wajib PKB belum membayarkan pajak akan masuk perincian pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun berikutnya pada tahun 2019 jumlah kendaraan semakin menurun sehingga jumlah tanggungan pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak daerah di UPPD Kabupaten Demak pertahunnya mengalami peningkatan. Oleh hal itu dari permasalahan diatas sebagai alah satu yang saya lakukan supaya peneliti tahu bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang ada di Kabupaten Demak

Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

| Tahun | Jumlah Kendaraan | Jumlah Denda PKB |
|-------|------------------|------------------|
| 2015 | 80165 | 1,390,849,550 |
| 2016 | 91494 | 1,848,893,675 |
| 2017 | 133,560 | 1,824,804,500 |
| 2018 | 146,533 | 3,913,232,100 |
| 2019 | 79601 | 4,077,507,600 |

Sumber: : UPPD Kabupaten Demak (2020)

Tabel diatas membuktikan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat setiap tahun. Maka dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi di Kabupaten Demak cenderung meningkat dari tahun 2015-2015.

Sebagian masyarakat kurang memahami atau kurang pengetahuan mengenai pajak mengakibatkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jika kualitas

pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran semakin tinggi maka semakin mudah mengedukasi masyarakat agar masyarakat memahami peraturan dan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deduktif. Metode ini menggunakan penelitian regresi linier berganda. Analisis yang akan diteliti yaitu wajib PKB yang terdaftar dalam UPPD Kabupaten Demak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib PKB

b. Jenis dan Sumber Data

Penggunaan jenis data pada penelitian ini merupakan primer dan sekunder. Data primer ini berasal dari responden (wajib pajak) di UPPD Kabupaten Demak pada penelitian ini didapatkan dari pengisian kuesioner. Sedangkan pengambilan data sekunder diperoleh dari UPPD Kabupaten Demak yang berupa data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2015-2019 dan sanksi administrasi PKB tahun 2015-2019.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ini diambil dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) sejumlah 79601 wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Sampel

Dalam penelitian teknik pengambilan sampel yaitu responden yang dijadikan sampel adalah wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Kabupaten Demak. Data yang diperoleh dari UPPD Kabupaten Demak sampai tahun 2019 jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berjumlah 79601. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin hasil menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh adalah 98,7 dan untuk mempermudah dalam perhitungan sampel yang digunakan adalah 100 dari populasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner (angket)

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner untuk melakukan pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau penjelasan tertulis kepada responden. Untuk skor kuesioner peneliti menggunakan skala *Likert*.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto,S. (dalam Tuti Alawiyah,2017:135) dokumentasi mencari data tentang sesuatu dan variasinya seperti catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah, agenda rapat, dan lain-lain.

c. Observasi

Menurut Nazir (dalam Wisata, D. T., & Harini, E., 2017:43) *Observasi* artinya melakukan penelitian dengan mengekstrak fakta dari gejala yang ada dan mengumpulkan informasi yang daktamengenai sistem ekonomi, sosial, maupun politik pada kelompok atau wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam rangka penguatan kemandirian pemerintah daerah, maka pemerintah dituntut untuk menggali semua sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut, tetapi harus dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penggalian potensi daerah yang meliputi pajak daerah hendaknya tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan dari perintah pusat.

Pemerintah Daerah mengelola Pendapatan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan guna mendukung kegiatan pembangunan daerah.

B. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan mengetahui normalitas setiap variabel. Uji normalitas variabel dengan melihat dari hasil uji *Kolmogorov - Smirnov* satu sampel dengan taraf sig. 0.05 dan jika sig > 0.05 maka dinyatakan terdistribusi normal. Tabel berikut menunjukkan hasil uji normalitas *Kolmogorov - Smirnov* menggunakan SPSS.

Normalitas Data *Kolmogorov- Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstand atdized Residual |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a, b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 6,596246 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,064 |
| | Positive | ,064 |
| | Negative | -,038 |
| Test Statistic | | ,064 |
| Asymp. Sig (2-tailed) | | ,200 ^{c, d} |

Berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, hasilnya mendapat nilai signifikan lebih dari 0.05. Artinya data berdistribusi normal yaitu sebesar 0.200.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Dalam membayar pajak semakin banyak orang yang patuh maka kesadaran mereka akan semakin meningkat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Demak mengenai perundang-undangan dan ketentuan pajak yang berlaku dengan cara membayar pajak yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai warga negara yang baik dan taat harus menerima apapun peraturan perundangan pajak yang dibuat oleh pemerintah.

Masyarakat harus tahu fungsi pajak bahwa fungsi pajak itu bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri dengan cara meminta bantuan sosialisasi dari dinas terkait kemudian ke kantor pajak untuk melakukan sosialisasi. Masyarakat tahu bahwa pembiayaan negara diperoleh dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Kabupaten Demak. Dalam membayar pajak semakin berat sanksi pajak yang diberikan maka kepatuhan semakin tinggi. Masyarakat memahami bahwa sebagai warga negara Indonesia kita menggunakan fasilitas dan juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Jika masyarakat membayarkan pajak dengan telat maka pemberian sanksi yaitu memberikan sanksi denda administrasi secara langsung pada saat membayarkan pajak. Masyarakat harus mampu atau tahu bagaimana cara menghitung denda. Caranya dengan melihat youtube mengenai tutorial membaca informasi perhitungan denda pajak

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam membayar pajak semakin banyak kesadaran membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maka kepatuhan mereka akan semakin meningkat. Upaya yang harus dipertahankan yaitu mengadakan kegiatan yang berbentuk partisipasi mengenai manfaat dari pemungutan pajak kepada masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai pajak agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayarkan Pajak Kendaraannya Bermotor (PKB) dengan tepat waktu.
2. Sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). bahwasannya semakin berat sanksi pajak yang diberikan maka kepatuhan semakin tinggi. Masyarakat yang patuh akan membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat dibutuhkan supaya pendapatan negara tetap optimal dan maksimal.
3. Analisis menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selain itu F hitung $10,557 > 0,05$. Kesimpulannya bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua faktor tersebut mempengaruhi 18,8% .

B. Saran

1. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Meningkatkan penggunaan media elektronik, seiring berjalannya waktu sistem pembayaran pajak modern perlu dilakukan sehingga diharapkan apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi UPPD Kabupaten Demak

Mengadakan sosialisasi mengenai pajak melalui iklan, radio, dan live talkshow mengadakan kegiatan yang berbentuk partisipasi mengenai manfaat dari pemungutan pajak kepada masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Perlu memperluas wilayah penyebaran kuesioner selain yang ada di Kabupaten Demak supaya dapat disamaratakan sehingga dapat memberikan gambaran menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.